



► PEMILU 2024

# Kebutuhan Warga Difabel Rawan Tak Terakomodasi

**UMBULHARJO—** Pemenuhan kebutuhan warga difabel dalam Pemilu 2024 masih sangat kecil. Berdasar hasil survei, hanya 35% warga difabel yang tercatat sebagai pemilih difabel. Sementara, 44,9% pemilih difabel terdata sebagai bukan difabel, dan 19,4% tidak mengetahui status mereka sebagai pemilih.

Lugas Subarkah & Aiffi Annissa Karin  
 redaksi@harianjogja.com

Fakta ini ditemukan dalam survei yang digelar secara kolektif oleh Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (Sigab) Indonesia, Pusat Rehabilitasi Yakkum dan Forum Masyarakat Pemantau untuk Indonesia Inklusif Disabilitas (Formasi) dengan dukungan Program Inklusi, Kemitraan Australia-Indonesia untuk Mewujudkan Masyarakat Inklusif.

Survei ini dilakukan secara daring dengan melibatkan 479 responden disabilitas dari 31 provinsi dengan kurun Desember 2023 hingga 2 Januari 2024. Survei ini dilakukan dengan metode *snow balling*.

Eksekutif Nasional Formasi Disabilitas, Nur Syarif Ramadhan menjelaskan dalam tahapan Pemilu 2024, tidak banyak petugas yang mengetahui keberadaan pemilih difabel.

► Dalam tahapan Pemilu 2024, tidak banyak petugas yang mengetahui keberadaan pemilih difabel.

► Kebanyakan surat suara yang rusak lantaran adanya lubang. Meski kecil, KPU tetap menjadikan surat suara itu tidak sah.

"Artinya, proses pendataan pemilih bagi difabel belum mengakomodasi semuanya. Petugas pendataan belum memahami bagaimana mengidentifikasi pemilih difabel," ujarnya dalam *Diseminasi Hasil Survei Persepsi Pemilih Difabel dalam Pemilu 2024* di Hotel Tara, Kamis (18/1).

Temuan ini diamini anggota KPU RI, Muhammad Affudin. Dia menjelaskan pada 2014 dirinya sempat mengusulkan agar kategori difabel dicantumkan dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Namun, tantangan lainnya masih banyak petugas yang belum memahami terkait dengan isu dan kebutuhan difabel dalam Pemilu. "Hanya masalahnya ada anggota petugas yang tidak menanyakan jenis disabilitas yang memilih, ada juga yang ketika tidak ditanya, dia juga tidak menginformasikan disabilitasnya," kata Affudin.

## 678 Surat Suara Rusak

Sementara dalam tahap persiapan pemungutan suara, KPU Kota Jogja menemukan adanya ratusan surat suara khususnya surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden yang rusak.

Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Jogja,

Ratna Mustika Sari menuturkan ada sebanyak 327.791 surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden yang teridentifikasi. "Ada 678 yang rusak," ujarnya, Jumat (19/1).

Ratna mengatakan surat suara yang rusak ditemukan pada proses sortir dan lipat. Surat suara yang telah tersortir akan diplenokan untuk dipastikan kembali kelayakannya dan ditemui 678 surat suara yang tidak sah digunakan. Alasannya bermacam-macam. Kebanyakan surat suara yang rusak lantaran adanya lubang. Meski hanya kecil, KPU Kota Jogja tetap menjadikan surat suara itu tidak sah. Lubang dinilai bisa menjadikan adanya interpretasi yang berbeda. "Ada juga warna yang tidak sesuai dengan surat suara yang sudah ditentukan oleh KPU," katanya.

Ratna memastikan jajarannya telah mengajukan permohonan surat suara pengganti. Ini ditargetkan akan datang dalam waktu dekat. Tepatnya sebelum deadline sortir lipat oleh KPU RI yang jatuh pada tanggal 20 Januari. Ratna mengatakan, proses selanjutnya adalah pengepakan surat suara. Targetnya dilakukan pada H-10 pemilu.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Ditanggapi

Yogyakarta, 16 Januari 2025  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005